

**ANALISIS KAUSALITAS KEBIJAKAN FISKAL EKSPANSIF
KEBIJAKAN MONETER EKSPANSIF DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



**OLEH:
FADHLIAH YUNIWINSAH
2015/15060083**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

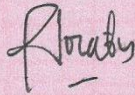
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KAUSALITAS KEBIJAKAN FISKAL EKSPANSIF,
KEBIJAKAN MONETER EKSPANSIF, DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DI INDONESIA

Nama : Fadhliah Yuniwinsah
NIM/TM : 15060083/2015
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2020

Disetujui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Meli Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2001

Diketahui Oleh:
Pembimbing



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS KAUSALITAS KEBIJAKAN FISKAL EKSPANSIF, KEBIJAKAN MONETER EKSPANSIF, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Nama : Fadhliah Yuniwinsah
NIM/TM : 15060083/2015
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2020

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Drs. Ali Anis, MS	1. 
2	Anggota	: Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si	2. 
3	Anggota	: Yollit Permata Sari, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Fadhliah Yuniwinsah
NIM / TahunMasuk : 15060083/2015
Tempat / TanggalLahir : Padang/ 09 Juni 1997
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Lubuk Begalung Kota Padang
No HP / Telepon : 0822-8841-5665
Judul Skripsi : Analisis kausalitas kebijakan fiskal ekspansif,
kebijakan moneter ekspansif dan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis /skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di PerguruanTinggi.

Padang, Februari 2020

Yang menyatakan,



Fadhliah Yuniwinsah
NIM. 15060083/2015

ABSTRAK

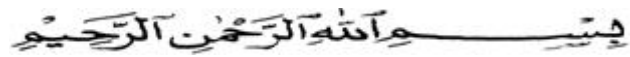
**Fadhliah
Yuniwinsah(15060083/2015)** : **Analisis Kausalitas Kebijakan Fiskal Ekspansif, Kebijakan Moneter Ekspansif dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang dengan Pembimbing Drs. Ali Anis, MS**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas antara kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif dan pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan moneter ekspansif dan pertumbuhan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif asosiatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2018 yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait. Model analisis menggunakan metode *Vector Autoregression* (VAR). Penelitian ini awalnya menggunakan metode *Vector Autoregression* (VAR), karena variabel dalam penelitian ini terintegrasi maka penelitian ini dilanjutkan dengan metode *Vector Error Correction Model* (VECM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat kausalitas antara kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif, namun memiliki hubungan satu arah. Tidak terdapat kausalitas antara kebijakan fiskal ekspansif dan pertumbuhan ekonomi, namun memiliki hubungan satu arah. Dan tidak terdapat kausalitas antara kebijakan moneter ekspansif dan pertumbuhan ekonomi, namun memiliki hubungan satu arah. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar pemerintah dapat mengontrol kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal Ekspansif, Kebijakan Moneter Ekspansif dan Pertumbuhan Ekonomi

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kausalitas Kebijakan Fiskal Ekspansif, Kebijakan Moneter Ekspansif dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan Do’a, dukungan serta semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. BapakDrs. Ali Anis, MS selaku Pembimbing penulis yang telah membimbing, memberikan motivasi, serta arahan dan dengan sabar mendengarkan keluhan kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
6. Abang-abang, Kakak-kakak dan Teman-teman semuanya serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya, Aamiin. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kita semua.

Padang, Januari 2020

Penulis

Fadhlih Yuniwinsah
NIM. 15060083

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
Bab II Kajian Teori, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis Penelitian	
A. Kajian Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual	27
D. Hipotesis Penelitian	28
Bab III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Definisi Operasional Variabel	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Langkah-langkah Analisis VAR.....	33
H. Implementasi Model VAR.....	37
Bab IV Hasil dan Pembahasan	
A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	39
2. Deskripsi Variabel Penelitian	43
3. Analisis Induktif	51
a. Hasil Uji Stasioneritas	51
b. Hasil Uji Penentuan Lag Optimum	52
c. Hasil Uji Kointegrasi	53
d. Uji Kausalitas Granger	55
e. Hasil Uji VECM	57
4. Hasil Implementasi Model VECM	60
a. Hasil Uji Respon Variabel	60
b. Hasil Uji Kontribusi Variabel	64
5. Pengujian Hipotesis	66
B. Pembahasan	68
Bab V Simpulan dan Saran	
A. Simpulan	73
B. Saran	74
Daftar Pustaka	75
Lampiran	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengeluaran Pemerintah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2012-2018	5
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2012-2018	39
Tabel 4.2 Pendapatan Per Kapita Indonesia Tahun 2012-2018	41
Tabel 4.3 Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2012-2017	42
Tabel 4.4 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1969-2018 ..	44
Tabel 4.5 Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1969-2018	47
Tabel 4.6 Jumlah Uang Beredar Indonesia Tahun 1969-2018	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Stasioneritas	52
Tabel 4.8 Hasil Uji Lag Optimal	53
Tabel 4.9 Hasil Uji Kointegrasi	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Kausalitas Granger	56
Tabel 4.11 Hasil Uji VECM	58
Tabel 4.12 Hasil Uji FEVD	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Analisis Kebijakan Publik	15
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 KFE Terhadap KME dan PE.....	61
Gambar 4.2 KME Terhadap KFE dan PE	62
Gamabr 4.3 PE Terhadap KFE dan KME.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan suatu negara. Jika ekonomi suatu negara tumbuh dengan cepat maka dapat dilihat pembangunan dari negara tersebut tentu juga akan mengalami kemajuan. Seperti tersedianya fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana lainnya. Ketersediaan itu semua tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dari tenaga kerja untuk membangun sebuah kemajuan terhadap negara tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan negara tentu diperlukannya biaya agar terwujudnya pembangunan suatu negara. Dimana negara menggunakan pendapatannya yang didapatkan dari penerimaannya yang kemudian dibelanjakan untuk keperluan negara. Pendapatan dan belanja negara diatur dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBD). Sehingga anggaran pendapatan negara dapat disesuaikan dengan pengeluarannya.

Menurut Mankiw (2006) ada dua cara untuk dapat mengukur nilai dari aktivitas ekonomi. Pertama, dengan melihat GDP sebagai pendapatan total atas setiap orang dalam perekonomian. Kedua, dengan melihat GDP sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa dari perekonomian. Sehingga kita dapat melihat apakah pertumbuhan dari ekonomi suatu negara tumbuh dengan baik atau sebaliknya tidak berkembang sama sekali. Maka dari itu pemerintah harus bisa meningkatkan GDP agar perekonomian negara dapat tumbuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada April tahun 2019, Indonesia mengalami defisit sebesar Rp 101,04 triliun. Defisit yang dialami pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terjadi karena pendapatan negara yang stag dan realisasi belanja yang cukup besar. Dalam kasus ini diperlukannya campur tangan pemerintah agar perekonomian negara dapat berjalan seperti yang diharapkan. Untuk itu pemerintah harus membuat sebuah kebijakan agar teratasinya masalah tersebut. Salah satu kebijakan yang dapat dijalankan pemerintah adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini merupakan instrumen kebijakan ekonomi makro untuk mengendalikan ekonomi ke arah yang diharapkan melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal terbagi atas kebijakan fiskal kontraktif dan ekspansif.

Kebijakan fiskal kontraktif yaitu kenaikan pajak dan penurunan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif yaitu penurunan pajak dan kenaikan pengeluaran pemerintah. Ketika perekonomian negara dalam keadaan yang memburuk, dimana terjadinya penurunan daya beli masyarakat diikuti oleh pengangguran yang tinggi maka pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketika perekonomian dalam kondisi memanas (*overheating*), maka pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal kontraktif untuk menurunkan permintaan, menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Menurut Tambunan (2001) pengeluaran pemerintah baik secara tidak langsung maupun langsung dapat mempengaruhi suatu perubahan terhadap struktur ekonomi. Pengeluaran pemerintah mencerminkan sebuah kebijakan

pemerintah, dimana ketika pemerintah menetapkan suatu kebijakan membeli barang dan jasa, tentu adanya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1998). Menurut Keynes dalam Deliarnov (2003) dengan menjalankan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian suatu negara dengan memberikan dana berupa pengeluaran pemerintah yang bisa menyerap tenaga kerja sehingga mampu mewujudkan proyek-proyek negara. Sehingga tersedia nya tenaga kerja atau sumber daya manusia yang baik, dapat menjalankan pembangunan negara yang mana akan mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berkelanjutan..

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Rosoiu (2015) yang berjudul *the impact of government revenues and expenditure on the economic growth* yang menggunakan metode *Vector Autoregression* (VAR) menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah.

Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Aimon (2013) di Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan metode *Vector Autoregression* (VAR), dimana hasil penelitiannya menunjukkan hubungan kausalitas positif antara pengeluaran sektor publik dan perekonomian daerah. Ketika perekonomian meningkat maka pengeluaran sektor publik juga akan meningkat dan menurunnya pengeluaran juga akan melemahkan perekonomian.

Akan tetapi, kebijakan fiskal ekspansif menjadi penyebab terjadinya jumlah uang yang beredar menjadi bertambah terlalu cepat dari yang seharusnya, sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan perekonomian suatu negara di akan datang (Deliarnov, 2003). Pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan tidak akan memberikan keuntungan bagi sebuah negara yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara.

Ketika pemerintah mencetak uang dengan jumlah yang sangat banyak maka dapat menyebabkan hiperinflasi, dimana pada saat itu tingkat harga menjadi naik sangat cepat dan uang pun menjadi berhenti sebagai penyimpan nilai. Tingginya jumlah uang beredar menyebabkan harga-harga menjadi naik. Menurut Friedman (1975) ketika laju pertumbuhan uang menjadi sangat tinggi maka dapat menyebabkan inflasi dan *booms*. Sedangkan ketika laju pertumbuhan uang menjadi turun, maka dapat menimbulkan resesi dan terkadang deflasi. Sehingga diperlukannya pengendalian oleh otoritas moneter dalam mencetak jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar ada 2 kebijakan moneter yang dapat dijalankan yaitu kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut dilakukan pada saat terjadinya inflasi di suatu negara. Selanjutnya kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan jumlah uang beredar.

Disaat pemerintah memutuskan untuk menjalankan kebijakan fiskal ekspansif, disaat itu pula pemerintah juga dapat menjalankan kebijakan moneter ekspansif. Dimana ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, maka diperlukannya uang untuk dikeluarkan guna mencapai pertumbuhan ekonomi, dan disaat itu lah terjadinya peningkatan terhadap jumlah uang yang beredar. Sehingga kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif jika dijalankan dengan baik maka dapat mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marshal (2016) yang menerapkan metode *Vector Autoregression* (VAR) dimana hasil penelitiannya menunjukkan hubungan searah antara jumlah uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, diperlukannya penekanan terhadap kebijakan moneter oleh otoritas moneter.

Untuk lebih jelas maka dapat dilihat hubungan dari kebijakan fiskal ekspansif dilihat dari pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter ekspansif dilihat dari jumlah uang beredar, dan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 sampai 2018 :

Tabel 1.1
Pengeluaran Pemerintah, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Uang Beredar dari Tahun 2012-2018

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Laju (%)	PE (%)	JUB	Laju (%)
2012	1,491,410.00	-	-	3,307,507,636,804,370	-
2013	1,650,563.00	10.67	5.56	3,730,197,122,280,670	12.78
2014	1,777,182.00	7.67	5.01	4,173,326,611,657,070	11.88
2015	1,806,515.00	1.65	4.88	4,548,800,392,762,800	9.00
2016	1,864,275.00	3.20	5.03	5,004,976,786,498,600	10.03
2017	2,133,296.00	14.43	5.07	5,419,165,045,825,050	8.28
2018	2,217,253.00	3.93	5.17	5,760,046,195,300,010	6.29

Sumber : Worldbank dan Badan Pusat Statistika

Pada tabel 1.1 dapat dilihat adanya data pengeluaran pemerintah, laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang beredar di Indonesia dari tahun 2012-2018. Pada pengeluaran pemerintah terdapat pembagian didalamnya, dimana 60 persen digunakan untuk belanja rutin, 25 persen untuk belanja modal, dan 15 persen digunakan untuk belanja barang (Kompas.com). Pada tahun 2013-2018 pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi kenaikan ini tidak diikuti dengan laju pengeluaran pemerintah yang mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2013 laju pengeluaran pemerintah sebesar 10.67 persen, kemudian turun di tahun berikutnya menjadi 7.67 persen. Di tahun 2015 laju pengeluaran pemerintah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana turun sebesar 6.11 persen menjadi sebesar 1.65 persen. Penurunan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat faktor eksternal. Seperti perdagangan di Indonesia yang mana berkontribusi dalam hal ekspor. Jika

perdagangan Indonesia dalam keadaan yang memburuk tentu akan berpengaruh buruk pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika perdagangan Indonesia dalam keadaan yang membaik maka akan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga kontribusi perdagangan dalam hal ekspor sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Ditahun berikutnya, Indonesia mencoba untuk meningkatkan perekonomiannya, sehingga laju pengeluaran pemerintah mengalami sedikit kemajuan dari 1.65 persen menjadi 3.20 persen. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang sangat signifikan dengan angka sebesar 14.43 persen. Terjadinya kenaikan ini disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang lebih kecil pada tahun sebelumnya. Sehingga ketika pengeluaran pemerintah ditingkatkan maka akan menambah output pada perekonomian. Pada tahun 2018 laju pengeluaran pemerintah lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.93 persen.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2012-2018 mengalami fluktuasi. Padahal jumlah PDB di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.56 persen. Kemudian mengalami penurunan sebesar 5.01 persen yang diikuti dengan penurunan laju pengeluaran pemerintah pada tahun tersebut sebesar 7.76 persen. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan sebesar 4.88 persen.

Penurunan yang terjadi dari tahun 2013-2015 disebabkan oleh dua hal sebagai berikut, pertama terjadinya perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yaitu menurunkan suku bunganya menjadi 0.25 persen. Ketika terjadinya

perubahan tersebut menyebabkan guncangan-guncangan terhadap negara *emerging market* termasuk Indonesia sehingga mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara. Kedua jatuhnya harga dari komoditas perkebunan dan pertambangan. Dimana sebesar 60-70persen pertumbuhan ekonomi diIndonesia diperoleh dari perkebunan dan juga pertambangan (Republika.co.id)

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mulai pulih dari kondisi buruk ditahun sebelumnya. Dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5.03 persen. Ini disebabkan karena Amerika Serikat (AS) mengubah kebijakannya yaitu menaikkan sukubunga nya menjadi 0.50 persen. Sehingga dapat mempengaruhi perekonomian negara menjadi lebih baik. Kemudian pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 5.07 persen. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.17 persen. Tingginya angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut mungkin disebabkan oleh kenaikan dari penerimaan negara yang melampaui target pada tahun 2018. Sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat data jumlah uang beredar dari tahun 2013 sampai 2018. Dimana jumlah uang beredar yang digunakan adalah *broad money*, yaitu M2 ditambah dengan uang kuasi. Jumlah uang beredar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Akan tetapi pada laju jumlah uang beredar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 jumlah uang beredar sebesar 12.78 persen. Kemudian terjadi penurunan pada tahun berikutnya sebesar 11.88 persen. Penurunan ini disebabkan karena turunnya pertumbuhan ekonomi yang mana menyebabkan terjadinya perlambatan terhadap uang kuasi.

Pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan sebesar 9.00 persen. Lalu terjadi peningkatan di tahun berikutnya sebesar 10.03 persen. Pada tahun 2017 laju jumlah uang beredar sebesar 8.28 persen. Terlihat bahwa laju jumlah uang beredar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan ini karena kontraksi operasi pada keuangan pemerintah pusat. Pada tahun 2018 laju jumlah uang beredar sebesar 6.29 persen dan merupakan besaran jumlah uang beredar terkecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dan fakta yang diungkapkan pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa adanya kecenderungan keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi. Atas dasar data dan fakta inilah penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Analisis Kausalitas Kebijakan Fiskal Ekspansif, Kebijakan Moneter Ekspansif, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat kausalitas antara kebijakan moneter ekspansif dan pertumbuhan ekonomi terhadap kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia?
2. Apakah terdapat kausalitas antara kebijakan fiskal ekspansif dan pertumbuhan ekonomi terhadap kebijakan moneter ekspansif di Indonesia?

3. Apakah terdapat kausalitas antara kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Terdapat kausalitas antara kebijakan moneter ekspansif dan pertumbuhan ekonomi terhadap kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia
2. Terdapat kausalitas antara kebijakan fiskal ekspansif dan pertumbuhan ekonomi terhadap kebijakan moneter ekspansif di Indonesia
3. Terdapat kausalitas antara kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Sebagai tambahan ilmu dalam bidang publik dan moneter
3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan masalah yang sama
4. Sebagai saran untuk mengambil kebijakan dalam perekonomian.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw (2006) perekonomian dapat diukur dengan PDB karena dapat dijadikan sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan dari PDB ini untuk meringkas dari semua kegiatan perekonomian yang dituangkan dalam PDB periode waktu tertentu. Ada dua cara untuk melihat kinerja dari perekonomian ini, salah satunya dengan melihat produk domestik bruto sebagai pendapatan total dari setiap orang dalam perekonomian Indonesia. Cara yang lain dengan melihat produk domestik bruto sebagai pengeluaran total output barang dan jasa dari perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan kenaikan PDB atau PNB tanpa dipengaruhi oleh besar kecilnya dari tingkat pertumbuhan penduduk, terjadi atau tidaknya perubahan struktur penduduk, dan perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kenaikan pendapatan nasional yang diikuti oleh peningkatan pendapatan per kapita di waktu tertentu (Putong, 2013). Sedangkan menurut Kuznets dalam Jhinghan (2002) pertumbuhan ekonomi merupakan naiknya kemampuan negara dalam menyediakan barang-barang bagi perekonomian, dimana akan menaikkan output secara *continue* dengan majunya teknologi dan penyesuaian sikap serta kelembagaan ideologis yang dibutuhkan negara.

Salah satu komponen yang penting dalam melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu dari pengeluaran konsumsi masyarakat tersebut (Persaulian dkk, 2013). Menurut Keynes (1936) menjelaskan bahwa pengeluaran agregat yaitu seluruh dari jumlah belanja masyarakat atas barang-barang dan jasa yang merupakan faktor utama dalam suatu negara untuk mencapai pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sedangkan menurut Sadono (2010) menjelaskan bahwa dalam perekonomian negara yang modern, pengeluaran agregat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, ekspor, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah.

Jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menaikkan porsi belanja pemerintah. Kenaikan belanja pemerintah akan menyebabkan naiknya permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat akan menyebabkan harga barang cenderung naik (Setiawan, 2018). Ada tiga penyebab pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat yaitu peningkatan stok modal (peralatan baru), kemajuan teknologi, dan input tenaga kerja (Wickens, 2008). Menurut Nopirin (2014) Kebijakan moneter merupakan suatu tindakan yang dijalankan oleh otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang beredar yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara.

Menurut Todaro (2003) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang baik dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang periode untuk menghasilkan tingkat

pendapatan nasional yang semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan pendapatan nasional dari periode ke periode yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan proses meningkatnya produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Dewi dan Ida, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai gambaran mengenai jalannya suatu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi dalam keadaan yang membaik maka dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah mengalami keberhasilan, namun sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi dalam keadaan yang memburuk maka dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah mengalami kegagalan.

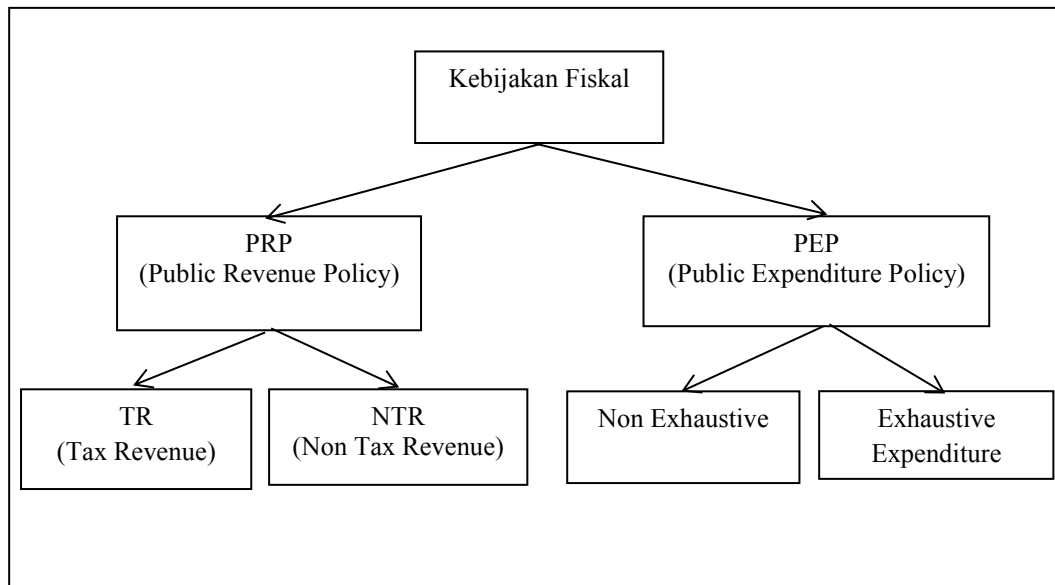
Stabilitas makroekonomi dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu : pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan keseimbangan neraca pembayaran (Todaro, 2003). Agar tercapainya stabilitas makroekonomi ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan perdagangan internasional (Mankiw, 2000). Kebijakan fiskal dengan cara melalui penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah (Alm, 2003). Kebijakan moneter dengan cara pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga (Suhaedi dkk, 2000).

2. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang efektif untuk mengatasi perekonomian yang lesu pada suatu negara (Ahmad dan Ferry, 2010). Menurut Mankiw (2013) menguraikan definisi kebijakan fiskal sebagai kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan belanja pemerintah.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang disesuaikan dengan bidang pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara (Rahayu, 2014) atau kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai suatu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kinerja perekonomian dengan cara memperhatikan mekanisme pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Ibrahim, 2013)

Menurut Hal Hill (2002) tujuan kebijakan fiskal secara esensial yaitu untuk memantapkan stabilitas makroekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri dan meningkatkan distribusi income. Menurut Alam (2007) pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah model seperti dibawah ini :



Sumber : Bailey, 1995

Gambar 2.1 Model Analisis Kebijakan Publik

Dari model diatas dapat dijelaskan bawa kebijakan fiskal terdiri dari *Public Revenue Policy* dan *Public Expenditure Policy*. Dimana PRP terdiri dari *tax revenue* dan *non tax revenue*. Sedangkan *Public Expenditure Policy* terdiri dari *exhaustive expenditure* dan *non exhaustive expenditure*. Penerimaan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa penerimaan negara merupakan semua penerimaan pajak, penerimaan non pajak, dan penerimaan hibah di dalam dan luar negeri. Menurut Suharo (2012) penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah yang berasal dari pajak oleh rakyat, yang mana akan digunakan untuk sejumlah pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) adalah penerimaan oleh instansi pemerintah yang berdasarkan undang-undang yang ditunjukkan kementrian keuangan kemudian disetorkan ke kas negara.

Sedangkan *Public Expenditure Policy* merupakan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan suatu negara. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993). Menurut Indrawati dan Daryono (2006) *exhaustive expenditure* merupakan pembelian barang dan jasa yang kemudian langsung dapat di konsumsi maupun juga menghasilkan barang lain. Sedangkan *non exhaustive* merupakan perpindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, sebagai pinjaman oleh perusahaan yang diberikan oleh pemerintah.

Pengeluaran pemerintah merupakan semua pembelanjaan dan sejumlah pembayaran atas barang dan jasa guna kebutuhan negara seperti membeli senjata, alat perkantoran, pembangunan jalan, gaji pns, angkatan bersenjata, dan lain sebagainya (Samuelson, 2004).

Menurut Suparmako (2002) pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari beberapa aspek berikut :

- a. Pengeluaran pemerintah secara langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
- b. Pengeluaran pemerintah merupakan tabungan guna investasi kekayaan ekonomi suatu negara.
- c. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran di masa yang akan datang.

- d. Pengeluaran pemerintah sebagai sarana tempat penyedia lapangan pekerjaan dan penyebaran daya beli yang luas.

Menurut Nanga (2005) dalam menjalankan kebijakan fiskal pemerintah dapat melakukan dua hal yaitu dengan menaikkan tingkat pajak atau melalui program pengeluaran pemerintah. Dimana kebijakan tersebut dapat bersifat kontraktif dan ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan penerimaan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan tingkat permintaan agregat dalam perekonomian suatu negara. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat permintaan agregat dalam perekonomian suatu negara.

Menurut Wickens (2008) beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal sebagai berikut :

- a. Dari sudut pandang ekonomi, pengeluaran dilakukan karena tiga alasan yaitu menyediakan barang publik, sebagai stabilisator otomatis, dan pemerataan kesejahteraan.
- b. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang tetap harus diikuti dengan pembiayaan pajak yang lebih tinggi.
- c. Kebijakan fiskal yang optimal dapat dicapai dengan pengeluaran pemerintah yang optimal juga.

Menurut teori Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa pemerintah berusaha menaikkan jumlah pengeluaran pemerintah yang tinggi, akan tetapi masyarakat tidak mau membayar pajak yang tinggi pula untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang juga tinggi. Menurut Ritonga (2003) pengeluaran pemerintah meliputi semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Menurut Haryadi (2014) *fiscal policy* adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Perotti (2002) dengan judul *Estimating The Effect Of Fiscal Policy in OECD Countries*, menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek yang positif dan signifikan terhadap PDB. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hoppner (2001) yang berjudul *A Var Analysis Of The Effect Of Fiscal Policy In Germany* menyatakan kenaikan dari pajak akan berpengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kenaikan dari pengeluaran pemerintah akan berpengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sigit Harjanto (2014) yang berjudul Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menunjukkan hubungan kausalitas satu arah dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah.

Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah digunakan sebagai alat penyeimbang untuk menanggapi perkembangan perekonomian negara yang terjadi. Disamping itu hukum Wagner juga menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah akan terjadi seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan Moneter merupakan kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral atau otoritas moneter dalam pengendalian besaran moneter dan suku bunga yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Menurut Warjiyo (2004) kebijakan moneter dibagi atas 2 yaitu:

- a. Kebijakan moneter ekspansif merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan cara menambah jumlah uang yang beredar. Dimana kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat disaat perekonomian mengalami keadaan resesi atau depresi.
- b. Kebijakan moneter kontraktif merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Dimana kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

Uang merupakan suatu alat pembayaran yang sangat penting dalam kehidupan. Para ekonom menjelaskan uang atau yang sering disebut dengan uang beredar merupakan sesuatu yang digunakan dalam melakukan pembayaran jasa atau barang dan pembayaran atas utang (Mishkin, 2010). Jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian di tentukan oleh

permintaan masyarakat dan besarnya penawaran oleh bank sentral (Ritonga, 2003).

Menurut Boediono dalam Vimala (2005) menjelaskan bahwa dalam perekonomian modern, jumlah uang yang beredar dikendalikan oleh bank sentral. Pencetakan uang merupakan mekanisme pasar, yaitu proses interaksi antara permintaan dan penawaran uang, tidak hanya mencetaknya saja. Penawaran uang yang terlalu banyak dibandingkan pengeluaran yang dihasilkan akan menyebabkan kecenderungan dari kenaikan suku bunga, harga dan berkurangnya produksi yang menyebabkan pengangguran (Huda, 2008).

Kaum monetaris mengatakan apabila penawaran uang melebihi permintaannya maka terjadi ketidakseimbangan dalam sektor moneter, oleh sebab itu permasalahan inflasi akan timbul. Atas dasar pemikiran tersebut salah satu argumen utama dari kaum monetaris adalah bahwa jumlah uang beredar merupakan instrumen kebijakan ekonomi (moneter) yang dapat dikendalikan oleh otoritas moneter (Deliarnov, 2003). Menurut Case&Fair (2004) uang memiliki tiga kegunaan yaitu sebagai unit hitung, penyimpanan nilai dan sebagai alat pertukaran.

Menurut Mankiw (2006) adanya hubungan antara transaksi dan uang dapat dituangkan dalam persamaan berikut, yang disebut dengan persamaan kuantitas (*quantity equation*) :

$$MV=PT \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

M : Uang

V : Perputaran

P : Harga

T : Transaksi

Sisi kiri persamaan yaitu M dan V mengukur sejauhmana uang berspekulasi dalam perekonomian. Sedangkan sisi kanan P dan T mengukur sejauhmana uang ditukarkan dengan barang. Jika salah satu variabel dari empat tersebut mengalami perubahan maka satu atau lebih variabel lain akan mengalami perubahan.

Jika didalam suatu negara, pertumbuhan ekonomi nya mengalami kemajuan, maka didalam negara tersebut, penggunaan uang kartal akan sedikit, yang akan digantikan dengan uang giral (Raharja dan Manurung, 2008). Uang dikelompokkan kedalam 2 bagian yaitu uang komoditas dan uang fiat. Dimana uang komoditas yaitu uang yang memiliki nilai intrinsik dalam penggunaan lain, dan uang fiat yaitu uang secara intrinsik tak bernilai (Case&Fair, 2004). Menurut Mankiw (2006) kuantitas uang diukur kedalam tiga kelompok yaitu :

Simbol	Cakupan Aset
M1	Mata uang ditambah deposito penerimaan dan cek
M2	M1 ditambah neraca reksadana pasar uang dan deposito tabungan
M3	M2 ditambah deposito berjangka surat berharga dan uang kuasi

Sumber : Federal Reserve

Sedangkan menurut Case&Fair (2004) kuantitas uang diukur kedalam 2 kelompok yaitu :

- a. M1 yaitu uang yang bisa digunakan untuk transaksi seperti uang kartal dan cek. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

$$M1 = \text{Mata uang yang disimpan diluar bank} + \text{demand deposit} + \text{cek perjalanan} + \text{deposito yang bisa dijadikan cek lainnya.}$$

- b. M2 yaitu Broad Money ukuran penawaran uang sangat luas yang mana ditambahkan dengan uang kuasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

$$M2 = M1 + \text{rekening tabungan} + \text{rekening pasar uang} + \text{uang kuasi}$$

Selanjutnya, menurut Bank Indonesia (BI) mendefinisikan uang kedalam 2 bagian.

- a. Pertama dalam arti sempit (M1 atau *Narrow Money*), menjelaskan kewajiban dari sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Dimana M1 meliputi uang kartal (C) dan uang giral (D) yang beredar di masyarakat.
- b. Kedua uang dalam arti luas (M2 atau *Broad Money*), menjelaskan kewajiban dari sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Dimana M2 meliputi uang kartal (C), uang giral (D), dan uang kuasi. Dengan kata lain, M2 yaitu M1 ditambah tabungan, simpanan berjangka, termasuk rekening pasar uang.

Maka dapat disimpulkan adanya perbedaan dalam pengelompokkan pengukuran uang, sehingga perbedaan antara M2 dan M3 menjadi tidak jelas.

Akan tetapi pada intinya pengukuran uang M2 dan M3 tergantung negara masing-masing. Dimana beberapa instansi memasukkan uang kuasi ke dalam M2 dan memisahkannya dengan M2, yang kemudian dimasukkan ke dalam M3.

Menurut Bank Indonesia (BI) uang kuasi digunakan untuk mendeskripsikan asset yang dapat diuangkan secara cepat. Uang kuasi meliputi deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik (Sukirno, 2011). Pada umumnya yang banyak digunakan dalam pengukuran uang yaitu M1 dan M2 (Herlambang, 2002).

Menurut Froyen (2013) kebijakan moneter merupakan pengendalian bank sentral atas jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mempengaruhi level ekonomi. Jika jumlah uang beredar dapat dikendalikan dengan baik maka akan mencegah terjadinya yang dapat memperburuk keadaan ekonomi seperti inflasi.

Sedangkan, menurut Milton Friedman jumlah uang beredar sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi yang mana merupakan faktor utama yang berasal dari sektor moneter. Selain itu tingkat harga akan turun secara bersama-sama dengan tingkat bunga uang setelah mencetak jumlah uang beredar dalam jumlah yang banyak yang akhirnya akan menaikkan output nasional (Arief, 1993). Menurut Febrian dalam Mursalin (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi jumlah uang beredar yaitu pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, dan permintaan uang.

4. Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Moneter Ekspansif

Adanya hubungan antara pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi. Dimana jika ingin menaikkan kenaikan pertumbuhan ekonomi maka diperlukannya peningkatan jumlah uang beredar, yang demikian pengeluaran pemerintah menyebabkan kenaikan terhadap jumlah uang beredar (Cheng dan Lai, 1997).

Menurut Persaulian (2013) terjadinya jumlah pengeluaran konsumsi yang meningkat akan menyebabkan penurunan terhadap uang kuasi, karena digunakan untuk belanja. Sebaliknya jika terjadi penurunan terhadap jumlah pengeluaran konsumsi maka akan menyebabkan kenaikan terhadap jumlah uang kuasi. Sehingga hubungan antara pengeluaran konsumsi dengan uang kuasi yaitu berlawanan. Menurut Friedman dalam Froyen (2013) menjelaskan efek perubahan dari anggaran pengeluaran pemerintah memegang konstan terhadap jumlah uang beredar, jika pajak tidak berubah maka pengeluaran pemerintah harus dibiayai dengan mencetak uang. Demikian jika pajak dipotong tetapi pengeluaran tidak berubah maka penerimaan pajak yang hilang diganti dengan menjual obligasi kepada publik atau mencetak lebih banyak uang.

5. Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut keynes, kebijakan fiskal dapat diandalkan dalam perekonomian suatu negara. Dimana dengan kebijakan fiskal pemerintah dapat menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan proyek pemerintahan yang mampu menyerap tenaga kerja (Deliarnov, 2003).

Ini berarti kebijakan yang dimaksud oleh Keynes yaitu kebijakan fiskal ekspansif, yang mana kebijakan tersebut menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut Aldoph Wagner dalam Musgrave dan Musgrave (2003) jika pemerintah melakukan kenaikan pada pengeluarannya maka akan menaikkan juga pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jika pemerintah melakukan kenaikan pada pertumbuhan ekonomi maka juga harus menaikkan pengeluarannya.

Kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah, akan tetapi kenaikan dan penurunan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Novela & Hasdi, 2017). Dapat dilihat bahwa terjadinya hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.

6. Kebijakan Moneter Ekspansif dan Pertumbuhan Ekonomi

Kaum Keynesian mengemukakan pendapatnya bahwa adanya kaitan erat antara jumlah uang beredar dengan fluktuasi ekonomi, akan tetapi dibantah oleh kaum Monetaris bahwa bukan keadaan moneter yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi ekonomi melainkan fluktuasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya keadaan moneter (Deliarnov, 2003). Obaid (2007) menguji hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar (M3) dan GDP riil di Mesir dari tahun 1970-2006, dengan pengujian Granger Causality, menjelaskan bahwa adanya hubungan kausalitas diantara pasokan uang riil dan GDP riil di Mesir.

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kenaikan belanja pemerintah dan pengurangan pajak yang bertujuan meningkatkan output dari pendapatan. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif merupakan peningkatan penawaran uang yang juga bertujuan meningkatkan output dari pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan diantara pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, dan pertumbuhan ekonomi. Yang mana terjadinya kenaikan dari pengeluaran pemerintah dan kenaikan dari penawaran uang menyebabkan terjadinya kenaikan pendapatan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Case & Fair, 2004).

B. Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis membutuhkan teori dan penelitian terdahulu. Dimana dibutuhkan sebagai pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan dan juga menjadi referensi untuk melihat relevan atau tidaknya penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu :

1. Faiz Masnan, Moh Shahidin, Nor Ermawati Hussain (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Relationship among Money Supply, Economic Growth and Inflation: Empirical Evidence from Three Southeast Asian Country*. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Jumlah Uang Beredar (M3) dan Indeks harga konsumen. Metode yang digunakan adalah teknik kausalitas Granger. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan jangka panjang di antara jumlah uang beredar, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di ketiga negara.

2. P Srinivasan (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Causality Between Public Expenditure and Economic Growth : The Indian Case*. Penelitian ini dilakukan dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2012. Dimana hasilnya menunjukkan tidak terdapat hubungan kausalitas, namun adanya hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah.
3. Olusanya Samuel Olumuyiwa dan Akinade Olusina Matthew (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Analysis Of Causality Between Monetary Policy and Economic Growth in Pre- and Post- Deregulated Nigeria Economy*. Penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah uang beredar, namun adanya hubungan satu arah di antara kedua variabel tersebut.
4. Benjamin S Cheng dan Tin Wei Lai (1997) dalam penelitiannya yang berjudul *Government Expenditure and Economic Growth In South Korea*. Penelitian ini menunjukkan terjadinya hubungan satu arah diantarajumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah.
5. Iwedi Marshal (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *The Link Between Money Supply and Economic Growth in Nigeria : An Econometric Investigation*. Variabel yang digunakan jumlah uang beredar dan PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan keterkaitan jangka pendek antara jumlah uang beredar dengan PDB.

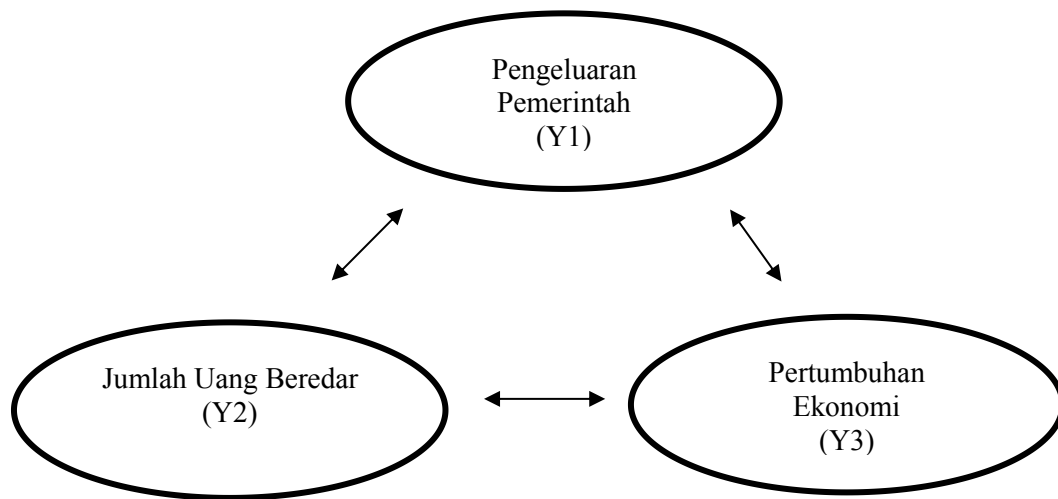
C. Kerangka Konseptual

Merupakan konsep untuk menjelaskan dan menentukan keterkaitan antar variabel penelitian sesuai permasalahan dengan berpatok pada kajian teori diatas.

Keterkaitan variabel yang diteliti adanya hubungan variabel kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan moneter ekspansif dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal ekspansif memiliki hubungan kausalitas dengan kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif memiliki hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter ekspansif dengan pertumbuhan ekonomi.

Untuk lebih jelas, maka dapat dilihat kerangka konseptual berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teori dan kerangka konseptual penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat kausalitas antara kebijakan moneter ekspansif dan pertumbuhan ekonomi terhadap kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat kausalitas antara kebijakan fiskal ekspansif dan pertumbuhan ekonomi terhadap kebijakan moneter ekspansif di Indonesia

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

3. Terdapat kausalitas antara kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif tidak terdapat kausalitas. Namun memiliki hubungan satu arah yaitu kebijakan moneter ekspansif mempengaruhi kebijakan fiskal ekspansif. Artinya, peningkatan kebijakan moneter ekspansif diikuti oleh peningkatan kebijakan fiskal ekspansif.
2. Kebijakan fiskal ekspansif dan pertumbuhan ekonomi tidak terdapat kausalitas. Namun memiliki hubungan satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan fiskal ekspansif. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh peningkatan kebijakan fiskal ekspansif.
3. Kebijakan moneter ekspansif dan pertumbuhan ekonomi tidak terdapat hubungan kausalitas. Namun memiliki hubungan satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan moneter ekspansif. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh peningkatan kebijakan moneter ekspansif.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, dapat dirumuskan saran sebagai berikut;

1. Pemerintah lebih memprioritaskan alokasi pengeluaran ke sektor-sektor yang bisa secara langsung mendorong produktifitas ekonomi nasional..
2. Pemerintah harus mengontrol jumlah uang beredar sehingga tidak terjadinya inflasi. yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.
3. Pemerintah lebih memperhatikan kebijakan apa yang seharusnya dijalankan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Misalnya dengan memilih menjalankan kebijakan fiskal ekspansif disaat perekonomian negara dalam keadaan yang memburuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Ferry. 2010. *Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal EP Indonesia Vol X. (2).
- Aimon, Hasdi. (2013). *Analisis Kausalitas Pengeluaran Sektor Publik Dengan Perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Barat*. Ejournal UNP.
- Alam, S. 2007. *Ekonomi*, Jilid 2. Jakarta: Esis
- Alm, J. 2003. Designing Institutions To Combax Tax Evasion In Developing and Transition Countries. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 9. (9).
- Ariefianto, M D. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE.
- Badan Pusat Statistik 2019. Jumlah Penduduk tahun 2012-2018. <http://www.bps.go.id> diakses tanggal 6 November 2019
- Badan Pusat Statistik. 2019. Pengeluaran Pemerintah tahun 1969-2018. <http://www.bps.go.id> diakses tanggal 4 Oktober 2019
- Benjamin, C dan Lai Tin Wei. 1997. An Investigation Of Co-Integration and Causality Between Energy Consumption And Economic Activity In Taiwan. Elsevier. 19(4)
- Case, K E dan Fair, R C. (2004). *Prinsip prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Cheng, Benjamis S dan Tin Wei Lai. 1997. Government Expenditure and Economic Growth in South Korea. Journal of Economic Development. 22(1)
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi SL dan Ida Bagus PP. 2012. Pengaruh PAD, PMA, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. E-Jurnal EP. 2 (11)
- Ekananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel Bagi Penelitian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Mitra Wacana Media.
- Froyen, Richard T. 2013. *Macroeconomics theories and policies*. England: Pearson Education
- Hal Hill. 2002. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Harjanto, Sigit. 2014. Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia. Jurusan Ilmu Ekonomi
- Herlambang T. 2002. *Ekonomi Makri:Teori, Analisis, dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia
- Hoppner. 2001. A Var Analysis Of The Effect Of Fiscal Policy In Germany.

- Huda. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ibrahim, Muhammad. 2013. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrawati, S dan Daryono S. (2006). *Analisis Uji Kausalitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta Dengan Menggunakan Metode Granger Tahun 1978-2003*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 7. (2).
- Jhingan, M L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Jhingan, ML. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kompas. (2011, Agustus 15). Dipetik Oktober 4, 2019, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/08/15/14382430/Belanja.Rutin.aksimal.60.Persen>
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, G. (2006). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N Gregory. (2000). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N.Gregory. 2013. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga
- Marshal, Iwedi. (2016). *The Link Between Money Supply And Economic Growth In Nigeria*. ResearchGate.
- Masnan, dkk. 2013. *Realtionship Among Money Supply, Economic Growth, and Inflation*.
- Mishkin, F S. 2010. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets 9th*. Jersey: Pearson.
- Mursalin. 2016. *Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe*
- Musgrave A Richard and Musgrave BP. 2003. *Public Finance in Theory and Practice, Seventh Edition*, McGraw-Hill, Inc., New York
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Nopirin. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Novela, H dan Hasdi, A. (2017). *Analisis Kausalitas Perumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan. Vol 1. (1).
- Obaid. 2007. *The Link Between Money Supply and Economic Growth in Nigeria: An Econometric Investigation*. Journal of Economics Business and Management Vol 2. (3).
- Olumuyiwa, O S dan Matthew, A O. (2012). *Analysis of Causality Monetary Policy and Economic Growth in Pre and Post Deregulated Nigeria Economy*. JHSS. Vol 5.

- Perotti, Roberto. 2002. Estimating The Effects Of Fiscal Policy In OECD Countries. CEPS Working Documents. (190)
- Persaulian, dkk. 2013. *Analisis Konsumsi Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol 1. (02).
- Putong, Iskandar. (2013). *Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahardja, P dan Manurung, M. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Lembaga Penerbit FEUI.
- Rahayu, AS. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Republika. (2017, Mei 22). Dipetik Oktober 4, 2019, dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/22/oqcnfx408mengapa-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-pada-20132015-melambat>
- Ritonga, dkk. 2003. Pelajaran Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Rosadi, Dedi. (2012). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rosoiu, Iulia. (2015). *The Impact Of Government Revenues And Expenditure On the Economic Growth*. Procedia Economics and Finance. 32.
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, WD. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Media Edukasi
- Setiawan, Heru. 2018. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia di Indonesia dengan Model SVAR*. Jurnal Ekonomi Terapan. Vol 3. (2).
- Srinivasan, P. 2013. *Causality Between Public Expenditure and Economic Growth*. Journal Of Economics and Management. Vol 7. (02).
- Suhaedi, dkk. 2000. Suku Bunga Sebagai Salah Satu Indikator Ekspektasi Inflasi. Buletin Ekonomi dan Perbankan. Vol 2. (4).
- Sukirno, Sadono. (2011). *Maroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmako, M. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi
- Tambunan, Tulus. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M P dan Stephen C S. (2006). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P dan Stephen C Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia*. Jakarta: Erlangga
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
- Warjiyo, Perry. 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia. Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

- Wickens, Michael. 2008. *Macroeconomic Theory*. Publish by Princeton University Press
- WorldBank. 2019. Gdp Growth tahun 1969-2018. <http://www.worldbank.go.id> diakses tanggal 4 Oktober 2019
- Worldbank. 2019. Gdp Per Capita tahun 2012-2018. <http://www.worldbank.go.id> diakses tanggal 6 November 2019
- WorldBank. 2019. *Money Supply* tahun 1969-2018. <http://www.worldbank.go.id> diakses tanggal 4 Oktober 2019
- Worldbank. 2019. Poverty tahun 2012-2017. <http://www.worldbank.go.id> diakses tanggal 9 Januari 2019
- Yunanto, M dan Medyawati H. (2014). *Monetary and Fiscal Policy Analysis*. Journal of Indonesian Economy and Business. Vol 29. (3).